

ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN AGRIBISNIS PETERNAKAN "SAPI POTONG" NASIONAL

Ardi Novra

Fakultas Peternakan Universitas Jambi. 36361

*Korespondensi email: ardinovra@unja.ac.id

Abstrak. Peta jalan dalam rencana induk pengembangan sapi dan kerbau mengindikasikan bahwa memasuki SDG pada tahun 2045 diharapkan Indonesia telah menjadi lumbung pangan asia (daging sapi) dengan populasi sapi dan kerbau mencapai 41,74 juta, produksi domestik menembus angka 1.151.698 ton dengan kontribusi usaha peternakan rakyat tinggal 5%. Menggunakan hasil sensus peternakan 2013 sebagai basis, maka terdapat 5,07 juta RTP sapi potong rakyat maka tahun 2045 akan tersisa hanya 4,17 juta atau menurun sebesar 0,90 juta atau laju penurunan 17,75% selama periode 2013-2045 (32 tahun) atau rata-rata menurun sekitar 0.55%/tahun. Industrialisasi peternakan yang tangguh, terjadi karena terintegrasinya proses produksi dari hulu ke hilir yang dibangun berdasarkan potensi dan kemampuan industri hulu. Pada era digitalisasi saat ini, konsep pembangunan industrialisasi peternakan tidak bisa lepas dari efisiensi usaha dengan memadukan sistem agribisnis dengan pengembangan usaha peternakan rakyat yang dilakukan melalui pola klustering, dimana para peternak rakyat dengan usaha sejenis beraktivitas dalam suatu kawasan (horizontal agribisnis). Hubungan antar sub-sistem bersifat kaptif akan memberikan suatu kepastian (*certainty*) pasar dan jaminan (*insurance*) dalam menjalankan usaha. Konsep ini merupakan model industri peternakan pada masa akan datang yang menggabungkan antara konsep *farming system* dengan sistem agribisnis yang berkerakyatan.

Kata kunci: industri, peternakan, rakyat, peta jalan, rencana induk

Abstract. The roadmap in the Grand Design for cattle and buffalo development indicates that entering SDG in 2045 it is hoped that Indonesia has become an asian food barn (beef) with a population of cows and buffalo reaching 41.74 million, domestic production surpassing 1,151,698 tons with the contribution of the people's livestock business only 5% left. Using the results of the 2013 livestock census as a basis, there are 5.07 million households for beef cattle, so that in 2045 there will be only 4.17 million or a decrease of 0.90 million or a decline rate of 17.75% during the 2013 - 2045 period (32 years)) or a yaerly average decline 0.55% . The strong industrialization of livestock is due to the integration of upstream to downstream production processes that are built based on the potential and capability of the upstream industry. In the current digitalization era, the concept of livestock industrialization development cannot be separated from business efficiency by integrating the agribusiness system with the development of smallholder farms which is carried out through clustering patterns, where smallholder farmers with similar businesses are active in a region (horizontal agribusiness). The relationship between sub-systems is captive in nature, providing certainty in the market and insurance in running the business. This concept is a model of the livestock industry in the future that combines the concept of farming systems with a populist agribusiness system

Keywords: industry, livestock, small business, roadmap, grand design

PENDAHULUAN

Sistem produksi ternak di dunia secara garis besar dapat dibagi atas sistem produksi berbasis ternak (*solely livestock production system*) dimana 90 persen bahan pakan dihasilkan "on farm", dan sistem campuran (*mix farming system*) dimana pakan ternak memanfaatkan hasil sampingan tanaman (FAO, 1994). Sistem pertanian campuran secara global menurut Steinfeld and Mäki-Hokkonen (1998) memberikan kontribusi terbesar (53,9 persen) dari total produksi daging dan diikuti sistem tanpa lahan (36,8 persen). Pada negara berkembang farming system dicirikan sebagai usaha pertanian yang berbasis ketersediaan sumberdaya alam termasuk air, lahan, areal penggembalaan, dan merupakan aktivitas

usahatani yang dominan (FAO, 2005). Hal yang sama dengan Indonesia dimana lebih dari 90%, usaha peternakan sapi diusahakan oleh peternakan rakyat dengan skala kecil, modal lemah serta masih bersifat usaha sampingan (Yusdja dan Ilham, 2006) dengan sistem pemeliharaan pada umumnya masih tradisional, belum banyak mendapat sentuhan teknologi, pengelolaan sederhana, dan kurang berwawasan agribisnis (Sumadi *dalam* Purnomo et al., 2017).

Kebijakan pada usaha sapi potong selayaknya dapat mengatasi permasalahan pada tingkat hulu sampai hilir, dengan upaya perbaikan pada setiap subsistem dan memperkuat keterkaitan dalam setiap subsistem agribisnis sapi potong (Lestari et al., 2017). Pada aspek implementasi masih menyisakan perdebatan antara konsep *“farming system”* yang lebih dikenal dengan usaha peternakan rakyat atau *“agribusiness system”* yang lebih mengedepankan peternakan sebagai sebuah perusahaan (Suwono *dalam* Tawaf, 2015). Kebijakan pasca reformasi cenderung inkonsistensi tanpa keberlanjutan sehingga muncul anekdot *“kebijakan berubah sesuai selera penguasa”*. Pada Kabinet Indonesia Kerja 2014 - 2019 yang pada awalnya mencanangkan program SPR (Sentra Peternakan Rakyat) sebagai pengganti Program Swasembada Daging Sapi (PSDS). Menurut Dirjend PKH Muladno (2016) merupakan program penataan ternak sekaligus peternak rakyat yang bertujuan mewujudkan usaha peternakan rakyat dalam suatu perusahaan kolektif yang dikelola manajemen tunggal, meningkatkan daya saing melalui pengetahuan, kesadaran dan penguatan keterampilan peternak. Program yang lebih menekankan pada transfer pengetahuan dan teknologi (*knowledge and technology transfer*) pada awalnya disebut sebagai terobosan baru hanya berjalan sesaat karena tarik menarik soal jumlah SPR antara Dirjen PKH yang mencanangkan 500 ribu sementara Mentan hanya menginginkan 50. Sejak 2016, program SPR digantikan dengan Upsus-Siwab (Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting) dengan dua program utama yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (Inka).

Program Upsus-Siwab yang kinerjanya dinyatakan cukup berhasil pada tahun 2017 dimana capaian kinerja pelayanan IB dari Januari 2017 - Maret 2018 (14 bulan), yaitu a) relisasi IB pada 4.905.881 ekor jauh melebihi target yang ditetapkan yaitu 4 juta ekor, b) menghasilkan sapi dalam kondisi bunting 2.186.892 ekor dan kelahiran ternak sampai bulan Maret 2018 sebanyak 1.051.688 ekor. Komparasi dengan target yang ditetapkan pemerintah yaitu dari 4 juta ekor betina produktif apsektor IB ditargetkan minimal 75% (3 juta ekor) dapat bunting dan memperoleh pedet baru (Kementan 2017). Angka konsepsi (*conception rate*) 44,56% dan kelahiran (*fertility rate*) sementara 21,44%, menunjukkan bahwa hanya target realisasi IB yang sudah tercapai dan bahkan melampaui target tetapi capaian kinerja IB itu sendiri masih jauh di bawah target capaian. Justifikasi apakah program Upsus-Siwab berhasil atau gagal dengan perjalanan yang masih pendek 1 - 2 tahun bukan merupakan sesuatu yang fair juga karena secara teknis apakah efektif dalam akselerasi pertumbuhan populasi dan secara ekonomi apakah mampu mendorong kesejahteraan peternak harus menunggu beberapa tahun.

Perjalanan kebijakan pembangunan peternakan sapi potong sebagaimana uraian diatas menjadi pengalaman berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk melakukan reformulasi pembangunan industri peternakan sapi potong rakyat pada masa akan datang

METODE DAN RUANG LINGKUP KAJIAN

Metode penulisan yang digunakan adalah kombinasi antara metode pustaka (ekplorasi data dan informasi), analisis dan pengolahan data secara matematika sederhana dan review kebijakan serta rangkuman pengalaman beberapa hasil riset dan pengembangan. Sesuai dengan topik makalah “*membangun industri peternakan sapi potong rakyat*” yang dikembangkan merupakan gabungan dari beberapa konsep antara lain a) konsep pembangunan industri kerakyatan, b) konsep SPR yang lebih menekankan pada penataan peternakan sapi potong rakyat dan transfer pengetahuan dan teknologi (*knowledge and technology transfer*), dan b) konsep pembangunan kawasan integrasi yang berkelanjutan.

ISI KAJIAN

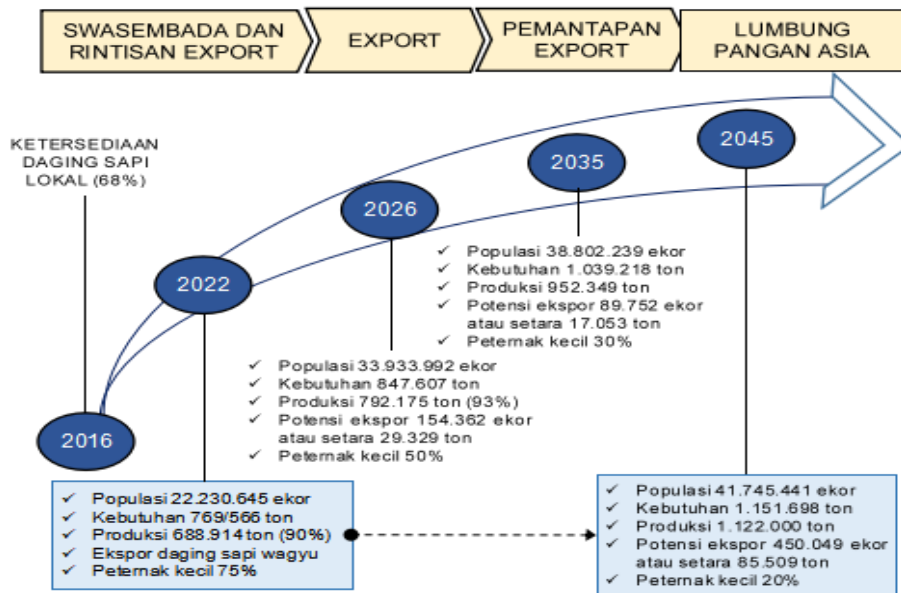
Arah dan Kebijakan Pembangunan Peternakan Sapi Potong

Keberpihakan pemerintah dapat dilihat dari arah dan kebijakan pembangunan peternakan sapi potong seperti pada grand desain yang dirinci dalam roadmap (peta jalan) pengembangan sapi dan kerbau tahun 2016 - 2045. Grand desain pengembangan sapi dan kerbau tahun 2045 dicapai melalui 4 (empat) tahapan sesuai dengan roadmap pengembangan sapi dan kerbau (Gambar 1), yaitu a) swasembada dan rintisan ekspor pada tahun 2022, b) ekspor pada tahun 2026, c) pemantapan ekspor pada tahun 2035, dan d) lumbung pangan Asia pada tahun 2045.

Memasuki SDG (*sustainable development goal*) tahun 2045 diharapkan Indonesia telah menjadi lumbung pangan dunia (daging sapi) dengan populasi sapi dan kerbau mencapai 41,74 juta, produksi domestik menembus angka satu juta yaitu 1.151.698 ton dengan kontribusi usaha peternakan rakyat hanya 5% dan sisanya 95% dari usaha skala menengah dan besar. Pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia diproyeksi 309 juta jiwa (Mulyani, 2019) sedangkan konsumsi daging sapi meningkat menjadi 2,79 kg/kapita/tahun (10,3%) pada tahun 2025, dan 3,04 kg/kapita/tahun (20,4%) pada tahun 2045 (Arifin, 2019). Artinya, pada tahun 2045 Indonesia membutuhkan daging sapi sekitar 939,36 ribu ton/tahun atau hampir 78,28 ribu ton/bulan atau 2,57 ribu ton/hari. Artinya dengan angka proyeksi kebutuhan tahun 2045 sebesar 1.151.698 ton dipenuhi dari ternak sapi 939,36 ribu ton dan kerbau 212,34 ribu ton.

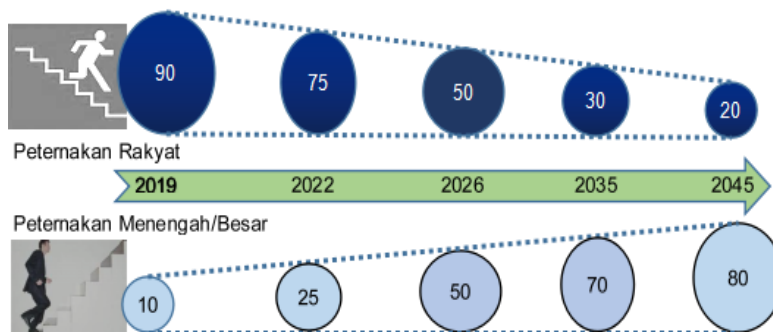
Target peningkatan kelompok usaha ternak sapi skala menengah dan besar jika dimaknai dengan peningkatan skala kepemilikan rumah tangga dan target kontribusi usaha peternakan rakyat 20% tahun 2045, maka ada beberapa simpulan yang bisa diambil yaitu a) ada upaya mendorong perkembangan populasi ternak dalam rumah tangga meskipun tidak disebutkan secara rinci besaran skala menengah dan besar tersebut, b) peningkatan skala usaha rakyat menjadi skala menengah dan besar secara tidak langsung akan menggeser peran usaha ternak sapi skala rumah tangga dari usaha sambilan atau sekedar

tabungan menjadi industri atau usaha pokok (utama) atau minimal cabang usaha, dan c) tranformasi dari usaha peternakan rakyat (skala kecil) menuju usaha peternakan menengah dan besar sebagai andalan dalam pemenuhan kebutuhan daging nasional dan untuk tujuan ekspor.



Gambar 1. Roadmap Pengembangan Sapi dan Kerbau (Sumber: Dirjen PKH)

Agenda besar pencapaian target sasaran untuk menjadi lumbung pangan Asia tahun 2045 tidak hanya ditandai dengan peningkatan produksi, populasi dan ekspor komoditas ternak sapi dan kerbau tetapi juga dengan perubahan struktural pelaku usaha peternakan. Jika selama ini pemasok utama kebutuhan daging domestik adalah usaha peternakan rakyat, maka pada tahun 2045 lebih mengandalkan usaha ternak sapi potong skala menengah dan besar (80%) dan sisanya 20% dari usaha peternakan rakyat (Gambar 2)..



Gambar 2. Tahapan Transformasi Struktural Produksi Daging Sapi dan Kerbau

Hasil sensus peternakan tahun 2013 sebagai basis, maka 5,07 juta rumah tangga peternak sapi potong dimana 66,34% mengusahakan hanya 1 - 2 ekor ternak sapi dan 75,75% tujuan pemeliharaan adalah pengembangbiakan (bukan dijual). Pemeliharaan ternak sapi hanya 65,96% dari 5,07 juta rumah tangga peternak yang mengandangkan ternaknya, sedangkan 34,14% sengaja dilepas seperti pola peternakan di Australia (Suryamin, 2014). Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 mencatat populasi ternak sapi potong mencapai 16,4 juta ekor, sapi perah 0,58 juta ekor dan kerbau 0,89 juta ekor yang dijadikan sebagai angka tetap (populasi awal) estimasi populasi sampai sensus berikutnya 2023. Jika diasumsikan

bahwa jumlah populasi yang dipelihara usaha peternakan sapi rakyat tahun 2045 adalah 8,35 juta (20% dari 41,74 juta) maka dengan rata-rata kepemilikan 2 ekor akan diperoleh jumlah RTP rakyat sekitar 4,17 juta. Suatu angka penurunan yang sangat signifikan dari 5,07 juta RTP tahun 2013 atau menurun sebesar 0,90 juta atau mengalami penurunan 17,75% selama kurun waktu 2013-2045 (32 tahun) atau rata-rata menurun sekitar 0.55%/tahun.

Bak “*Naik Turun Tangga*”, menurun akan terasa lebih mudah dibanding menaiki anak tangga yang membutuhkan sumberdaya dan energi lebih besar untuk sampai pada anak tangga terakhir. Turun dalam roadmap tidak serta merta diartikan sebagai penurunan total jumlah RTP tetapi sebagian RTP rakyat bertransformasi menjadi peternak skala menengah dan/atau besar. Transformasi struktural inilah yang selayaknya jadi agenda besar dalam pencapaian target sasaran grand desain dan roadmap pengembangan sapi dan kerbau, yaitu melalui a) transformasi sebahagian usaha RTP skala kecil (rakyat) menjadi skala menengah/besar (peningkatan kepemilikan pada tingkat rumah tangga) dan b) peningkatan jumlah wirausaha atau pengusaha baru pada sektor usaha peternakan sapi potong. Artinya bahwa tidak akan ada niat dari pemerintah untuk mengurangi atau menghambat peternakan rakyat tetapi didorong untuk memiliki skala ekonomis dengan tetap memotivasi timbulnya wirausaha baru.

Kembali kepada naik turun tangga maka kita abaikan cara untuk turun dan fokus pada bahasan cara naik karena butuh energi besar dan kadang banyak ditemui kendala. Pengalaman berbagai program dan kegiatan pada masa lalu tentu dapat menjadi rujukan agar lebih mudah menapaki setiap anak tangga untuk mencapai tujuan utama. Agar pada masa datang tak timbul lagi “*kebijakan yang tidak bijak*” dan bahkan bernuansa “*komedi*”. Kebijakan yang katanya berorientasi kepada rakyat tetapi dalam implikasinya terkesan mengabaikan peternakan rakyat, kebijakan yang katanya berbasis pemanfaatannya potensi sumberdaya yang kaya raya tetapi dalam skenarionya masih tetap fokus pada wilayah prioritas tertentu yang kadang sudah eksis dan sulit dipaksakan untuk berkembang. Sebagai contoh, pada program PSDS 2014, dari 18 provinsi sebagai sentra sapi potong dikelompokkan menjadi 3 kelompok daerah prioritas, yaitu a) kelompok I Daerah Prioritas IB yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali, b) kelompok II Daerah Campuran IB dan INKA yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo, dan c) kelompok III Daerah Prioritas Kawin Alam yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Transformasi Usaha Peternakan Rakyat

Upaya mendorong peningkatan skala kepemilikan (usaha) RTP sapi potong selama ini dapat dikatakan kurang berhasil dan selalu dikaitkan dengan faktor permodalan. Faktor ketersediaan modal diakui memang menjadi salah satu faktor kendala tetapi hanya menjadi bagian kecil dan lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik dan perilaku RTP sapi itu sendiri. Fenomena lapangan yang terjadi selama ini menunjukkan beberapa karakteristik dan perilaku yang melekat pada RTP yang potensial menjadi

faktor kendala peningkatan skala usaha, antara lain a) ternak sapi yang dipelihara mayoritas RTP sapi rakyat adalah bagian tak terpisahkan dari usahatani lainnya, b) tujuan utama pemeliharaan ternak sapi bagi RTP perdesaan bukan untuk dijual tetapi lebih sebagai tabungan yang hanya dilepas guna memenuhi kebutuhan memerlukan dana besar, c) usaha ternak sapi bukan merupakan sumber pendapatan bersifat harian (*daily income*) dan bahkan bulanan (*monthly income*) tetapi lebih bersifat tahunan (*yearly income*) terutama usaha pengembangbiakan, d) ternak sapi bagi RT usahatani terdiversifikasi adalah asset yang fleksibel, sehingga ketika terjadi kelangkaan sumberdaya tenaga kerja maka dalam rangka rasionalisasi pilihan prioritas utama adalah pelepasan ternak sapi dibanding asset lain seperti lahan, e) peningkatan kesejahteraan dan aktiivtas ekonomi RT pada beberapa kasus juga menjadi faktor pendorong pelepasan ternak sapi. Karakteristik dan perilaku tersebut tidak akan pernah terungkap dalam data statistik termasuk dalam buku-buku teks tetapi merupakan realita yang diyakini ada pada peternakan sapi potong rakyat. Secara teoritis semua dapat dijelaskan dan akan berujung pada suatu simpulan bahwa “*RTP sapi potong adalah pelaku ekonomi rasional*” yang selayaknya jadi bahan pemikiran dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Selama ini mereka hanya dianggap sebagai objek bagi kita yang “*merasa sangat tahu*”, padahal peran mereka sebagai pelaku sangat menentukan keberhasilan kebijakan.

Membangkitkan Wirausaha Sapi Potong

Agenda kedua dalam transformasi dari usaha peternakan skala kecil menuju usaha menengah dan besar adalah membangkitkan wirausaha baru bidang peternakan sapi potong. Selama ini investasi dalam usaha peternakan sapi potong relatif masih “sangat rendah” dan terbatas pada sektor jasa dan perdagangan seperti feedlot (penggemukan). Feedlot adalah suatu sistem manajemen di mana penggembalaan ternak sapi dilakukan secara alami pada areal terbatas yang tidak menghasilkan pakan sehingga tergantung pada pasokan pakan eksternal. Sejauh ini dikenal 4 sistem penggemukan yang diterapkan, yakni sistem *pasture fattening*, *dry lot fattening*, sistem kombinasi yakni *pasture* dan *dry lot fattening*, dan sistem kereman (penggemukan) *dry lot fattening* yang lebih sederhana. Penggemukan merupakan usaha budidaya ternak dalam waktu tertentu dengan cara membeli bakalan untuk kemudian diberi pakan untuk meningkatkan bobot badan sapi, dan pada waktu yang telah ditentukan sapi tersebut dijual. Pemeliharaan dilakukan secara intensif dengan waktu tertentu yang telah ditetapkan (misalkan 3, 4, 6 dan 9 bulan) dan sering dilakukan rekayasa pakan untuk mendapatkan pakan kualitas nutrisi baik tapi bernilai ekonomis, sehingga bobot potong tinggi dan kualitas karkas yang baik tercapai. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan menerapkan teknologi feedlot dibandingkan penggemukan yaitu lahan yang dibutuhkan relatif tidak luas, sudah diprogram dengan lahan tertentu untuk jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu ternak tersebut diganti dengan ternak bakalan baru. Manajemen tata laksana pemeliharaannya juga relatif lebih mudah dan lebih sederhana, sehingga kita dapat dengan mudah melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha ternak.

Pada sisi lain, investasi usaha pembibitan masih sangat langka dan mayoritas merupakan investasi publik yang dilakukan terbatas oleh pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah dan dunia usaha dalam

usaha pembibitan masih sangat rendah karena membutuhkan investasi besar dan bersifat jangka panjang (*long-run investment*) serta memiliki margin keuntungan rendah. Hasil analisis kelayakan Balai Pembibitan Ternak (BPT) Sapi Potong Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi menunjukkan bahwa pada aspek finansial diperoleh tingkat pengembalian modal (IRR) hanya 3,56% (Novra et al, .2009). Pengembangan BPT ini meskipun masih layak bagi proyek pembangunan sektor publik tetapi kurang diminati pemilik modal swasta karena daya saing investasi sektor pembibitan lebih rendah dibanding lainnya. Pengembangan usaha pembibitan sangat penting karena selama ini usaha penggemukan skala menengah mulai mengalami kelangkaan pasokan bakalan, sedang usaha feedlot skala besar lebih mengandalkan pasokan bakalan impor. Kementan mencatat realisasi impor sapi bakalan hingga akhir 2018 mencapai 205.527 ekor, sementara impor indukan baru 21 ribu ekor. Permentan No. 02/Permentan/PK.440/2/2017 tentang perubahan Permentan No. 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminisia Besar ke dalam Wilayah RI telah menerbitkan skema 5:1 bagi importir sapi yaitu mewajibkan perusahaan importir untuk setiap lima bakalan harus ada satu sapi indukan yang diperuntukkan untuk budidaya kembali oleh petani.

Upaya pemerintah dalam mendorong lahirnya pengusaha peternakan sapi potong skala menengah sudah pernah dilakukan melalui jalur akademisi yaitu program SMD (Sarjana Membangun Desa). Kegagalan program SMD dalam mencetak wirausahawan baru usaha sapi potong dapat dijadikan proses pembelajaran untuk membangun industri sapi potong skala menengah. Kegagalan program ini menunjukkan bahwa mencetak pengusaha bukan hanya sekedar penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) tetapi lebih dari itu adalah bagaimana membangkitkan motivasi. Saat seleksi sering timbul pertanyaan tentang siapa dan bagaimana kriteria calon pengusaha yang kita cari, apakah yang kita cari calon peternak atau pengusaha ternak sapi. Jawaban “pasti” semua pihak adalah kita mencari calon pengusaha ternak sapi tetapi mayoritas yang terjaring malah “calon wirausaha berCAP pengusaha” bukan “calon wirausaha yang pengusaha”. Banyak peserta SMD yang kemudian usahanya tidak berkembang dan bahkan meninggalkan usaha kelompoknya karena mendapat pekerjaan baru.

Padahal keberadaan SMD di kelompok ternak berbekal ilmu dan teknologi, kreativitas serta wawasan agribisnis, diharapkan dapat berinteraksi dan bersinergi membangun kerjasama yang harmonis dengan mengelola agribisnis berbasis peternakan. Program SMD dilaksanakan sejak tahun 2007 dan sampai tahun 2012 tercatat jumlah total penerima manfaat program sebanyak 2,694 kelompok dengan total anggaran yang telah dikururkan sebesar Rp 778.82 Miliar. Hasil penelitian Refita et al (2017) menunjukkan bahwa program SMD belum dilaksanakan berdasarkan potensi wilayah kelompok penerima dan belum efektif baik ditinjau dari indikator ekonomi dan teknis maupun kelembagaan. Faktor penghambat efektivitas program SMD adalah belum adanya rencana strategis, partisipasi para pemimpin pemerintahan dan masyarakat setempat masih rendah, dan kurang efektivitasnya proses seleksi (perekrutan), pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program. Gambaran singkat program SMD dalam menciptakan para pengusaha peternakan terutama sapi potong ini sangat mirip dengan struktur pasar tenaga kerja alumni perguruan tinggi peternakan dan kesehatan hewan. Meskipun tidak

tersedia data dan informasi yang cukup valid tapi dari fenomena yang ada sangat sedikit dari mereka yang bertahan jadi pengusaha peternakan sapi potong. Banyak penyebab dari kegagalan bertahan tersebut dan tidak hanya berkaitan dengan hal teknis misalnya kerugian usaha akibat kinerja usaha tidak mencapai target sasaran. Sebahagian ada yang berhenti karena mendapatkan pekerjaan baru dan bahkan karena performans yang bagus diangkat menjadi pegawai pemerintah meskipun sebagai honorer dengan gaji yang lebih kecil.

Makna di balik semua itu adalah ternyata mereka yang sudah mencoba untuk terjun jadi pengusaha peternakan sapi potong itu sendiri tidak percaya bahwa usaha yang dimodali pemerintah bisa menjadi jaminan hidup. Mereka lebih memilih pekerjaan lain meskipun untuk sementara harus mendapat gaji yang lebih kecil tetapi lebih bisa menjamin keberlangsungan kehidupan masa depan. Menyalahkan mereka juga “sesuatu yang salah” karena memang realitanya seperti itu karena hal yang sama juga terjadi pada para pengusaha yang sudah teruji memiliki naluri bisnis. Seberapa banyak para pemilik modal dinegeri ini yang tertarik untuk investasi pada usaha peternakan sapi potong dan jika ada mayoritas cenderung pada bisnis perdagangan dan feedlot dibanding sektor produksi. Padahal dari sisi ilmu ekonomi, insentif apa yang kurang dari komoditas penghasil daging merah negeri ini. *Bukankah, harga yang tinggi dan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun merupakan insentif untuk investasi dan didukung dengan pangsa pasar terbuka lebar dan selalu akan meningkat seiring meningkatnya pendapatan dan taraf hidup konsumen.*

Pemerintah juga sudah berupaya memotivasi dengan berbagai insentif seperti kredit pembiayaan bunga rendah (subsidi) seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus Peternakan. KUR yang mulai disalurkan pada tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp 8,9 miliar pada 69 anggota kelompok peternakan rakyat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dengan skema subsidi bunga. Suku bunga yang sebelumnya 12% selanjutnya sejak 1 Januari 2018, tersebut diturunkan pada titik terendah sebesar 7%. Pada pemerintahan periode sebelumnya dikenal juga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) yang diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/PD.400/9/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi. Suku bunga yang dibebankan kepada pelaku usaha sebesar 5%/tahun dalam jangka waktu kredit paling lama 6 tahun, dengan masa tenggang (*grace period*) paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Meski menjadi tulang punggung pencapaian swasembada daging sapi 2014, program KUPS belum berjalan seperti yang diharapkan dan terbukti hingga tanggal 4 Mei 2010 hanya terealisasi Rp 56,75 milyar dari plafon alokasi anggaran Rp. 145 milyar. Menurut hasil penelitian Susanti et al (2012) menyimpulkan bahwa realisasi pencapaian kinerja KUPS penambahan induk, penambahan pelaku usaha pembibitan, dan penyaluran kredit sangat rendah sehingga kredit program KUPS belum berhasil dan efektif untuk mendukung Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014.

Rendahnya tingkat efektivitas program SMD dalam mencetak wirausaha baru dan serapan kredit usaha peternakan bunga bersubsidi menunjukkan ada sesuatu yang salah. Berbagai insentif kebijakan pada sektor riel yang diharapkan mampu menggerakkan sisi supply belum bekerja secara efektif dan

efisien dalam mendukung pencapaian swasembada daging. Insentif kebijakan dianggap belum mampu mendorong “*brand image*” agribisnis peternakan sebagai salah satu ladang bisnis yang menarik dan menguntungkan. Untuk itu, pada masa akan datang dibutuhkan arah dan kebijakan yang tidak hanya mampu menjanjikan tingkat keuntungan atau pengembalian modal yang berdaya saing tetapi juga mampu memberikan jaminan keberlangsungan pendapatan dan kehidupan para pelaku usaha. Berbagai usaha dapat dilakukan antara lain dengan mendorong peningkatan nilai tambah (*value added*) dan diversifikasi nilai manfaat usaha peternakan itu sendiri dengan tetap berbasis pada usaha ternak sapi potong yang efisien dan bersandar pada potensi sumberdaya yang tersedia.

Jadi “Kita” Pilih yang Mana?

Setelah membaca dan memahami berbagai kendala yang akan dihadapi dalam transformasi struktural peternakan sapi potong diatas, akan timbul pertanyaan “*Kita Akan Pilih yang Mana?*”. Jika Penulis sebagai pengambil kebijakan akan menjawab “*Saya Akan Pilih Keduanya*” tetapi dengan “*Syarat dan Ketentuan Berlaku*” (meminjam istilah populer dalam masyarakat bisnis jasa di Indonesia). Menurut Tawaf (2019), terdapat dua model pendekatan pembangunan peternakan yang digunakan selama ini yaitu sistem agribisnis yang diintroduksi era tahun 2000an (lahir di Amerika serikat tahun 1950an yang berbasis korporasi) dan konsep usaha tani rakyat (*farming system*) yang lebih dikenal dengan konsep ekonomi kerakyatannya (ekonomi Pancasila). Kedua model pendekatan ini sebenarnya dapat dikombinasikan dan secara kasat mata sebenarnya ada dalam rohnyanya program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang sempat dikembangkan.

Program SPR bukan usahanya yang diubah dari usaha rakyat (*farming system*) menjadi sistem agribisnis tetapi lebih ditekankan pada perubahan perilaku, dimana RTP sapi potong rakyat menjalankan usaha dengan menerapkan kaedah-kaedah bisnis secara kolektif dalam suatu kelembagaan yang disebut SPR. Konsep SPR menawarkan jasa layanan yang terintegrasi termasuk jasa layanan iptek produksi, reproduksi, kesehatan hewan, pengolahan pakan dan limbah sampai pengolahan hasil pasca pemotongan. SPR juga didukung dengan manajemen pemasaran, akses pasar dan pembiayaan serta lembaga keuangan mikro yang lebih terkoordinir sehingga menjadi salah satu alternatif upaya pencegahan dini pengurusan ternak sapi betina produktif. SPR juga menawarkan partisipasi banyak stakeholder baik para pelaku dalam sistem agribisnis (peternak, pedagang, petugas IB dan Keswan) maupun pihak eksternal pemilik modal dan bahkan mahasiswa dan para peneliti baik perguruan tinggi maupun lembaga litbang lainnya. SPR adalah suatu aksi kolektif (*collective action*) pelaku usaha peternakan rakyat dalam suatu sistem agribisnis yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Individu masyarakat secara alami cenderung memilih aksi bersama ketika ada kesamaan dalam hal tujuan yang ingin dicapai dan merasa adanya ketidakpastian dan resiko yang dihadapi jika bergerak sendirian (Syamsuddin et al., 2007). Pada kawasan SPR tidak hanya berbicara tentang bisnis tetapi juga koneksitas antar pihak, riset dan pengembangan, transfer ilmu dan teknologi serta industri pendukung (investasi dan lembaga keuangan). Pada tataran lebih luas, SPR memiliki kemiripan dengan

Sains and Techno Park (STP) sebagai suatu kawasan yang dikelola multi stakeholder, berbasis Iptek dan mengedepankan R&D serta membuka ruang partisipasi pihak eksternal dalam satu manajemen. , .

Reposisi Peran dan Kedudukan Peternakan Sapi Potong

Reposisi (repositioning) dalam strategi pemasaran menurut Lamb et. al (2003) adalah merubah persepsi konsumen dari *relasi brand* menjadi *kompetisi brand*. Reposisi dilakukan untuk menyangga pertumbuhan permintaan pada saat pasar sedang melemah atau untuk mengoreksi kesalahan posisi. Sasaran utama strategi reposisi adalah membentuk citra merek tertentu di benak konsumen sehingga berhubungan erat dengan pengambilan keputusan. Memposisikan produk tidak hanya sekedar konsumen mengetahui keberadaan produk tapi juga dapat memberi kepuasan berarti bagi konsumen. Reposisi produk (repositioning) yang dilakukan bertujuan untuk menempatkan suatu posisi yang unik di benak konsumen, sehingga konsumen diharapkan akan memiliki kesan tertentu terhadap merek tertentu atau dikenal dengan *brand image*. Konsep reposisi dalam strategi pemasaran ini pada dasarnya dapat dijadikan acuan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan sub-sektor peternakan termasuk peternakan sapi potong. Usaha peternakan sapi potong di Indonesia mayoritas (98%) adalah usaha peternakan rakyat dengan karakteristik skala usaha relatif kecil; merupakan usaha rumah tangga dan usaha sampingan; menggunakan teknologi sederhana; dan bersifat padat karya berbasis organisasi kekeluargaan (Aziz, 1993).

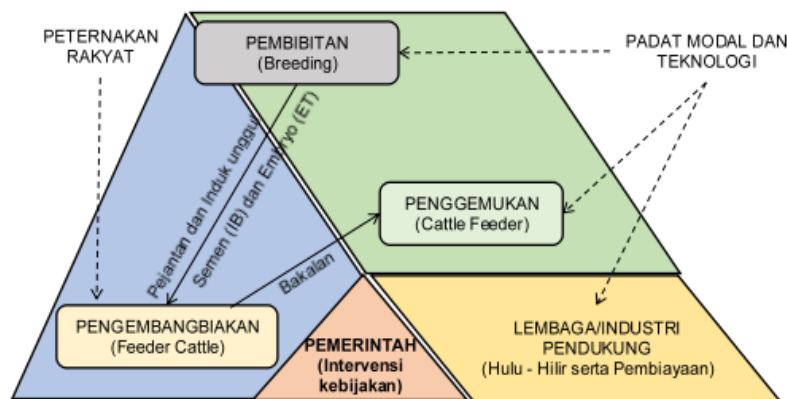
Indikator keberhasilan industrialisasi ditentukan oleh kinerja dari industri meskipun bukan menjadi tujuan akhir dari pembangunan ekonomi, Industrialisasi menurut Robiani (2005) merupakan upaya mencapai tingkat pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan, yang selanjutnya menciptakan pendapatan/kapita tinggi. Kebijakan industrialisasi peternakan telah mengubah *mind set* pejabat pemerintah dan meninggalkan realita kondisi sesungguhnya yaitu meninggalkan peternakan rakyat skala kecil/tradisional. Kesan bahwa pembangunan industri peternakan tidak lagi pro-produsen atau peternak rakyat yang terlihat dari *grand design* pembangunan sapi potong dan kerbau bahwa populasi peternakan rakyat di tahun 2045 hanya tinggal 20% (Tawaf, 2019).

Skala Makro: Spesialisasi Wilayah dan Fokus Prioritas

Langkah pertama dari aspek makro adalah reposisi dalam aspek kewilayahan agar memiliki skala prioritas tertentu untuk wilayah dengan karakteristik potensi sumberdaya alam dan pasar tertentu. Pemahaman terhadap ekonomi industri menjadi sesuatu hal yang penting dalam membangun industri peternakan. Ekonomi industri menelaah struktur pasar dan perusahaan yang secara relatif lebih menekankan pada studi empiris dari faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pasar, perilaku pasar dan kinerja pasar. Beberapa alasan kenapa ekonomi industri menjadi semakin penting untuk dipelajari, baik di negara-negara maju maupun di negara yang sedang berkembang, yaitu: a) praktek-praktek struktur pasar yang semakin terkonsentrasi dalam kegiatan bisnis dan praktek-praktek perilakunya menimbulkan kerugian bagi konsumen, b) semakin tinggi konsentrasi industri cenderung mengurangi persaingan antar perusahaan sehingga menciptakan perilaku yang kurang efisien, c) konsentrasi industri yang tinggi membawa konsentrasi kekayaan yang melemahkan usaha-usaha pemerataan, baik dilihat dari

pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, maupun kesempatan berusaha, d) kaitan struktur industri dengan penyelesaian masalah-masalah ekonomi membawa lebih jauh intervensi pemerintah, dan e) kajian-kajian tentang struktur-perilaku dan kinerja industri tidak terlepas dari masalah-masalah produksi dan distribusi (Hasibuan, 1994).

Pada konteks reposisi pembangunan industri peternakan sapi potong nasional dapat mempertimbangkan tiga point pertama dari 11 point sesuai pendapatan Setiawan (2017), yaitu kedekatan dengan bahan baku terutama pakan, tenaga kerja (sumberdaya manusia) dan aksesibilitas pasar (sentra konsumen). Membangun industri peternakan sapi potong seperti membangun sebuah rumah yang selalu memperhatikan kepentingan para penghuninya. Setiap penghuni selalu ingin mendapat perlakuan kebijakan dan ditempatkan pada lokasi yang sesuai dengan peran dan karakteristik mereka. Membangun rumah industri peternakan sapi potong Indonesia dapat dimulai dengan desain kamar-kamar yang akan ditempati para pelaku usaha dengan karakteristik dan tujuan tertentu, dan peternakan sebagai suatu industri pada dasarnya dibangun atas 5 komponen (Gambar 3).



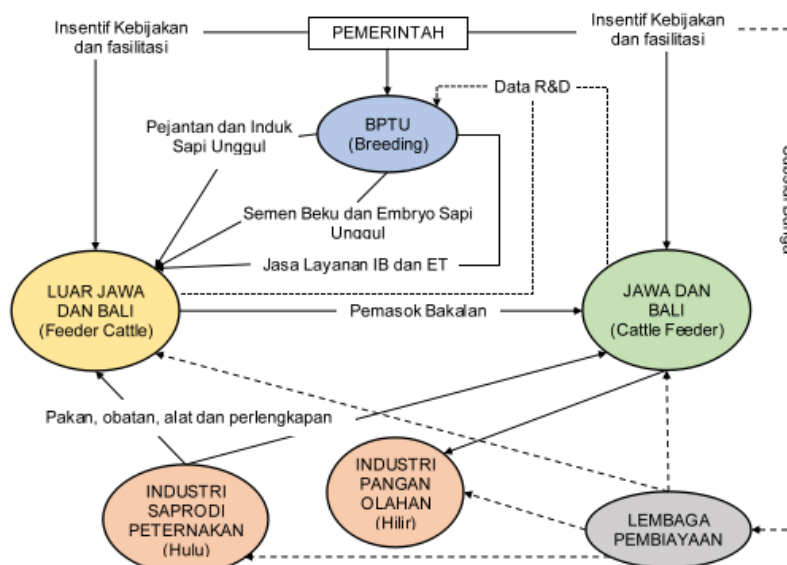
Gambar 3. Rumah Besar Industri Peternakan Sapi Potong

Kelima komponen (pelaku) dalam industri peternakan sapi potong adalah pelaku pembibitan (*breeding*) guna menghasilkan ternak unggul, pelaku budidaya (pengemukan dan pengembangbiakan), pemerintah dan industri pendukung. Secara umum sistem budidaya ternak sapi di Indonesia masih bertujuan ganda karena masih belum begitu banyak pengusaha yang secara khusus memproduksi anak sapi calon pengemukan. Hal ini berbeda dengan negara-negara maju seperti Eropa, Amerika dan Australia dimana usaha pengemukan dan pengembangbiakan untuk produksi sapi bakalan merupakan usaha yang terpisah dan dikenal dengan istilah sebagai berikut a) *Cattle Feeder (pengemukan)* yaitu peternak yang khusus melakukan usaha pengemukan dan tidak memproduksi anak sapi ataupun calon-calon sapi pengganti yang akan digemukkan, dan b) *Feeder cattle (pengembangbiakan)* yaitu pengusaha ternak sapi yang secara khusus memproduksi anak sapi (bakalan) dan tidak membesarkan atau melakukan usaha pengemukan.

Pemeliharaan ternak sapi pada usaha pengemukan cenderung bersifat intensif pada areal yang terbatas dengan dukungan teknologi yang dominan adalah teknologi pakan karena tujuan utama mendapatkan pertambahan bobot badan. Pakan menjadi komponen biaya produksi terbesar disamping

bakalan yang diberikan dalam bentuk konsentrat dan hijauan hanya sebagai pelengkap. Usaha penggemukan ini umumnya dilakukan pada wilayah dengan areal lahan terbatas dan cenderung menjadikan kedekatan dengan konsumen (akses pasar) sebagai pertimbangan utama dalam menentukan lokasi usaha. Pada saat ini di Indonesia untuk usaha skala besar lebih dikenal dengan nama “fedloter” dan berkembang di sekitar wilayah Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten) serta beberapa provinsi penyangga seperti Lampung. Pangsa pasar utama fedloter adalah wilayah Jakarta dan sekitarnya atau dikenal dengan Jabodetabek dan saat ini sumber utama bakalan adalah sapi impor yang tergolong ras sapi unggul (bobot badan besar). Pada sisi lain, pemeliharaan ternak sapi untuk tujuan pengembangbiakan lebih tersebar merata di seluruh Indonesia dan mayoritas dilakukan oleh usaha peternakan rakyat. Produk utama yang diharapkan adalah berupa anakan baik jantan maupun betina sehingga teknologi produksi yang paling dibutuhkan adalah teknologi reproduksi seperti Inseminasi Buatan (IB), INKA (intensifikasi kawin alami), sinkronisasi birahi, pemeriksaan kebuntingan sampai pada teknologi embrio transfer (ET). Mayoritas sistem pemeliharaan ternak adalah semi-intensif dan bahkan ekstensif (pengembalaan) sehingga membutuhkan lahan yang lebih luas sehingga sebenarnya tidak begitu cocok dikembangkan di daerah padat penduduk seperti Pulau Jawa dan Bali. .

Kedua jenis usaha pemeliharaan sapi tersebut perlu didukung dengan usaha pembibitan ternak sapi guna menghasilkan ternak sapi unggul. Profil usaha pembibitan umumnya adalah investasi besar, bersifat jangka panjang serta padat teknologi sehingga kurang diminati sektor privat atau swasta. Intervensi pemerintah dengan mengambil alih peran usaha pembibitan telah dilakukan sejak lama dengan berkembangnya berbagai Balai Pembibitan Ternak Sapi Unggul (BPTU). Peran BPTU tidak hanya menyediakan ternak unggul (pejantan dan induk) tetapi juga menyediakan material dan layanan jasa teknologi reproduksi seperti bahan (semen beku) dan peralatan Inseminasi Buatan (IB), sinkronisasi birahi dan embryo transfer (ET). Berdasarkan uraian diatas maka skema dan model tata kelola serta keterkaitan antar pelaku dan wilayah dalam industri peternakan sapi potong di Indonesia secara ringkas disajikan pada Gambar 4. .



Gambar 4. Skema Pengembangan Industri Peternakan Sapi Potong

Segmentasi wilayah antara Jawa-Bali dengan wilayah lainnya dalam industri peternakan sapi potong bukan berarti bahwa untuk wilayah Jawa-Bali seluruh usaha adalah cattle feeder begitu juga sebaliknya. Pada wilayah luar Jawa dan Bali masih terbuka lebar untuk pengembangan cattle feeder karena juga banyak konsumen tetapi bukan menjadi prioritas pembangunan, begitu juga sebaliknya pada wilayah Jawa dan Bali feeder cattle masih terbuka tetapi bukan menjadi prioritas kebijakan dalam anggaran. Segmentasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan fokus kebijakan pengembangan agar penganggaran lebih fokus sesuai kebutuhan spesifik wilayah. Penggunaan sumberdaya akan dapat lebih dioptimalkan guna mencapai tujuan serta saling ketergantungan antar wilayah yang kita harus yakini akan mampu menciptakan kebersamaan. Hal inilah yang disebut dengan clusterisasi dimana dalam suatu wilayah industri ada spesialisasi baik dalam komoditas, pelaku dan kebijakan.

Terdapat 3 (tiga) peran penting pemerintah dalam menjaga keberlanjutan industri peternakan yaitu sebagai regulator melalui berbagai kebijakan dan sebagai fasilitator dan motivator guna menjaga keberlanjutan industri. Peran sebagai regulator adalah dengan memilih dan mendesain berbagai kebijakan yang sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya wilayah. Peran sebagai fasilitator melalui kebijakan yang mampu mengakselerasi pertumbuhan dunia usaha misalnya melalui kebijakan subsidi bunga investasi dan menjadi penjamin dalam kredit usaha peternakan. Peran pemerintah sebagai motivator melalui berbagai kebijakan yang secara tidak langsung mampu mendorong terciptanya lingkungan kondusif bagi dunia usaha. Lingkungan kondusif bagi dunia usaha jaminan operasional usaha dengan tersedianya sarana dan prasarana produksi (hulu) dan kepastian pasca produksi (pasar) termasuk industri pengolahan. Pada prinsipnya, rumah besar industri peternakan akan berkelanjutan jika “kegembiraan” menjadi menu keseharian dalam operasional dunia usaha tanpa ada kekuatiran dan ketidakpastian dalam mendapatkan input dan memasarkan output.

Skala Mikro: Berdaya Guna Tak Harus Jadi yang Utama

Usaha peternakan sapi potong di Indonesia umumnya masih dikelola secara tradisional, yang bercirikan dengan usaha hanya sebagai usaha keluarga atau sebagai usaha sampingan. Menurut Santoso et al (2012) tipologi usaha peternakan dibagi berdasarkan skala usaha dan kontribusinya terhadap kepadatan rumah tangga dapat diklasifikasikan atas a) usaha sambilan dimana usaha ternak diusahakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*subsistence*) dengan kontribusi dari usaha ternak < 30%, b) cabang usaha dimana petani peternakan mengusahakan pertanian campuran (*mixed farming*) dengan ternak sebagai cabang usaha dengan kontribusi usaha ternak 30-70% (semi komersial atau usaha terpadu), c) usaha pokok dimana peternak mengusahakan ternak sebagai usaha pokok dan usaha komoditas lain sebagai usaha sambilan (*single commodity*) dengan kontribusi usaha ternak 70-100%, dan d) usaha industri dimana komoditas ternak diusahakan secara khusus (*specialized farming*) sehingga kontribusi usaha ternak 100% (komoditas pilihan).

Membangun industri peternakan sapi potong yang tangguh jangan dimaknai sebagai upaya mentransformasi seluruh atau mayoritas usaha peternakan sebagai usaha pokok apalagi sebagai industri.

Membangun industri peternakan dalam konteks ke-Indonesiaan sebaiknya lebih dimaknai sebagai upaya mendorong usaha peternakan sapi untuk berperilaku dan beroperasi layaknya sebagai sebuah industri. Industri yang berdaya saing adalah industri yang berhasil mentransformasi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dengan cara memperhatikan prinsip-prinsip dasar efisiensi ekonomis. Efisiensi ekonomis merupakan produk efisiensi teknik dan harga, sehingga akan tercapai jika efisiensi teknis dan harga sudah tercapai. Efisiensi ekonomis merupakan efisiensi dari sudut pandang makro dan mempunyai jangkauan lebih luas dibanding efisiensi teknis (mikro). Pengukuran efisiensi teknis cenderung terbatas pada hubungan teknis dan operasional dalam proses konversi input menjadi output, sehingga untuk meningkatkan efisiensi teknis hanya butuh kebijakan mikro yang bersifat internal, yaitu dengan pengendalian dan alokasi sumberdaya yang optimal.

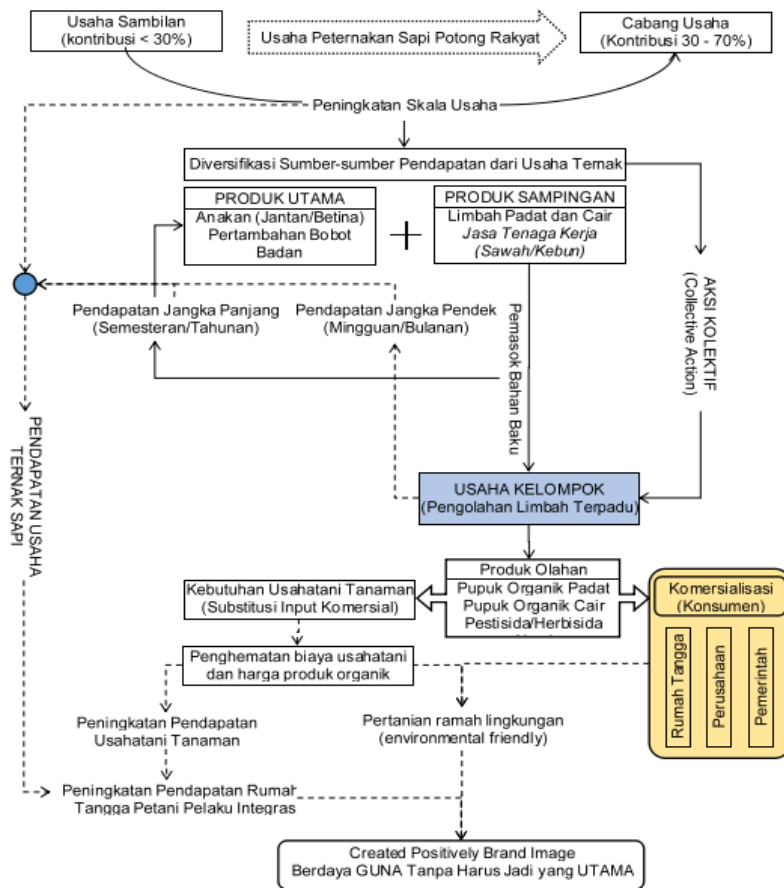
Daya saing industri peternakan sapi potong nasional tidak hanya terbatas dengan daya saing dengan komoditas sejenis produksi negara lain, tetapi lebih luas dari itu adalah daya saing dalam komoditas usaha tani. Pelepasan ternak sapi potong oleh rumah tangga yang dengan mudah dilakukan dan rendahnya minat usaha dan investasi pada usaha peternakan sapi potong selama ini tidak terlepas dari daya saingnya yang lemah terhadap komoditas atau jenis usaha lainnya. Pada rumah tangga perdesaan dengan usahatani terdisversifikasi akan lebih mudah untuk mengurangi skala usaha ternak sapi dibanding usaha tani lainnya karena tidak begitu signifikan mempengaruhi ekonomi rumah tangga. Para pelaku usaha (pemilik modal), pilihan usaha (investasi) pada sektor pertanian lain seperti perkebunan lebih menjanjikan dibanding usaha (investasi) pada sektor usaha peternakan yang memberikan tingkat keuntungan atau pengembalian modal lebih rendah. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk usia produktif, berkerja pada bidang atau sektor peternakan sapi potong belum menjadi pilihan prioritas karena *brand image* yang sering muncul adalah kurangnya kepastian keuntungan usaha yang dapat menjamin keberlangsungan pendapatan mereka.

Selama ini usaha peternakan sapi potong belum memiliki “*brand image*” sebagai usaha yang dapat diandalkan menjadi sumber pendapatan utama (usaha pokok dan industri), dan sektor usaha dan investasi yang menarik karena menjanjikan keuntungan dan keberlanjutan pendapatan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama kenapa penegasan kembali (reposisi) peran dan kedudukan usaha peternakan sapi potong dalam kerangka membangun industri peternakan tangguh. Berdasarkan permasalahan, kondisi eksisting, sebaran potensi sumberdaya alam dan manusia, serta efektifitas kebijakan yang telah dilakukan, maka beberapa langkah strategis dalam rangka reposisi peran dan kedudukan usaha peternakan sapi potong antara lain adalah:

1. Proses industrialisasi selayaknya dipandang sebagai upaya pada sudut pandang makro tetapi implementasinya dalam skala mikro (rumah tangga) tidak terlalu memaksakan transformasi usaha peternakan rakyat menjadi usaha pokok dan/atau industri tetapi cukup menjadi cabang usaha terutama untuk tujuan pengembangbiakan (*feeder cattle*). .

2. Peternakan sapi potong sebagai cabang usaha terutama pada perdesaan sebagai wilayah konsentrasi peternak dicirikan dengan rumah tangga pelaku usahatani campuran (mix farming) baik tanaman pangan maupun perkebunan.
3. Upaya peningkatan status sebagai cabang usaha tidaklah cukup dengan upaya peningkatan kepemilikan atau skala usaha ternak sapi tetapi juga perlu upaya lain guna mendorong peningkatan nilai tambah (*value added*) usaha ternak sapi potong.
4. Peningkatan nilai tambah tersebut dilakukan melalui diversifikasi sumber- sumber pendapatan asal dari usaha ternak sapi dengan karakteristik sebagai berikut: a) mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ternak sapi yang dimiliki tanpa menambah beban kerja yang melebihi sumberdaya tersedia, b) mampu mengubah karakteristik pendapatan usaha ternak sapi dari sekedar pendapatan jangka panjang (tahunan/semesteran) menjadi jangka pendek (mingguan atau bulanan), c) mampu mendorong transformasi sistem pemeliharaan dari ekstensif (pengembalaan) dan semi intensif (pengembalaan terbatas) menjadi intensif (dikandangkan) dan d) mampu meningkatkan kontribusi usaha ternak sapi terhadap pendapatan rumah tangga dan mendukung efisiensi cabang usahatani tanaman (perkebunan dan/atau pangan).
5. Produk yang dihasilkan bersifat komersial dan memiliki pangsa pasar yang masih terbuka luas serta potensial mendukung pertanian ramah lingkungan atau pertanian ekologis terpadu (PET).
6. Pengelolaan sumber daya ternak sapi potong non-produk utama (anakan dan penambahan bobot badan) sebaiknya dilakukan secara kolektif melalui pengembangan sentra-sentra produksi kelompok.

Konsep dasar “Berdaya Guna Tanpa Harus jadi Utama” merupakan upaya untuk menciptakan “brand image” positif usaha ternak sapi potong sebagai cabang usaha yang mampu berkontribusi positif bagi ekonomi rumah tangga. Peningkatan kontribusi usaha ternak sapi potong dilakukan melalui diversifikasi sumber-sumber pendapatan dari ternak sapi sehingga upaya peningkatan skala ternak diiringi dengan peningkatan nilai tambah by-product (langsung) dan produktivitas ternak sapi (tidak langsung). Peningkatan kontribusi terhadap usaha tani lain melalui pemanfaatan produk olahan industri atau usaha kelompok sebagai substitusi input komersial yang tidak hanya mendorong efisiensi usaha (keuntungan) tetapi juga ramah lingkungan (Gambar 5). Pendekatan pembangunan industri peternakan sapi potong rakyat seperti ini akan efektif menciptakan brand image positif dan potensial diintegrasikan dengan berbagai program pembangunan prioritas lainnya. Jaminan profitabilitas dan keberlanjutan usaha diharapkan mampu mengubah paradigma penduduk usia produktif untuk menjadikan usaha ternak sapi potong sebagai pilihan alternatif lapangan kerja dan usaha. Para pemilik modal akan lebih tertarik untuk investasi terutama dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).



Gambar 5. Membangun Industri Peternakan Sapi Potong Rakyat

KESIMPULAN

Industrialisasi peternakan yang tangguh, terjadi karena terintegrasinya proses produksi dari hulu ke hilir yang dibangun berdasarkan potensi dan kemampuan industri hulu. Pembangunan peternakan berbasis industri dimulai sejak pemerintah menetapkan konsep sistem agribisnis, pada era tahun 2000an. Pada era digitalisasi saat ini, konsep pembangunan industrialisasi peternakan tidak bisa lepas dari efisiensi usaha dengan memadukan sistem agribisnis dengan pengembangan usaha peternakan rakyat. Konsep ini bisa dilakukan melalui pola klustering, dimana para peternak rakyat dengan usaha sejenis beraktivitas dalam suatu kawasan (horizontal agribisnis). Kegiatan lanjutan dari klustering ini dihubungkan oleh sistem aplikasi digital yang bersifat tertutup secara vertikal antar kelompok peternak kluster. Hubungan usaha antar sub-sistem bersifat kaptif akan memberikan suatu kepastian (*certainty*) pasar dan jaminan (*insurance*) dalam menjalankan usaha. Konsep ini merupakan model industri peternakan pada masa akan datang yang menggabungkan antara konsep *farming system* dengan sistem agribisnis yang berkerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

Diarmita, I. K, 2018. Arah Pembangunan Peternakan Indonesia, Menuju Swasembada Protein Hewani, <http://www.majalahinfovnet.com/2018/03/arrah-pembangunan-peternakan-indonesia.html>, Accessed March 21th 2016.

- FAO (Food Agriculture Organization), 1995. World livestock production systems. Animal Production and Health Paper, .FAO, Rome, Italy.
- _____, 2005. Farming system and poverty: analysis of farming system. 18th International Symposium & Global Learning Opportunity Rome, Italy October 31-November 4, 2005 http://www.fao.org/farmingsystems/ description_en.htm
- Jatimprov.go.id. 2015. Tahun Depan, Satu Sentra Peternakan Rakyat Dapat Dana Sekitar Rp 1 Miliar. Kolom Berita dan Pengumuman. <http://jatimprov.go.id/read/berita-pengumuman/tahun-depan-satu-sentra-peternakan-rakyat-dapat-dana-sekitar-rp-1-miliar> Accessed November 26th 2015.
- Lestari, R.D., L.M. Baga, dan R. Nurmalina. 2017. Daya saing usaha penggemukan sapi potong peternakan rakyat di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. *Buletin Peternakan* 41: 101-112.
- Muladno, 2016. Program SPR Kementan tingkatkan kesejahteraan peternak, <https://www.antaraneews.com/berita/538410/program-spr-kementan-tingkatkan-kesejahteraan-peternak>, Accessed January 6th, 2016.
- Novra, A., 2011. Study Kelayakan Usaha Integrasi Sawit Sapi (ISS) PT. Perkebunan Nusantara VI, Laporan PTP Nusantara VI Wilayah Sumbar-Jambi, Jambi.
- Novra, A. dan Adriani, 2015. Masterplan Pengembangan Kawasan Integrasi: Program SPR Provinsi Jambi, Laporan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi, Jambi.
- Novra, A., Suparjo, Endriani dan A. Meilin, 2015. Model Aksi Kolektif untuk Kemandirian Rumah Tangga Menghadapi "Temporary Lost Income" Program Replanting Karet Rakyat, Hibah Penprinas MP3EI tahun 1 DPRM Kemenristek Dikti, LPPM Universitas Jambi, Jambi
- Novra, A., 2016. Rencana Pengembangan Kawasan SPR (Sentra Peternakan Rakyat) Kabupaten Merangin, Laporan kerjasama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Merangin, Jambi.
- Purnomo S.H., E.T. Rahayu, S.D. Antoro. 2017. Strategi pengembangan peternakan sapi potong rakyat di Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. *Buletin Peternakan* 41 (4): 484-494
- Refita, Y, H. Siregar dan A I Suroso, 2017. Evaluasi Program Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Strategi Pengembangannya (Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat), *Journal of Regional and Rural Development Planning*, Vol. 1 (1): 98-113.
- Robiani, B. 2005. Analisis pengaruh industrialisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 6(1), 93-103.
- Stamboel, K., 2009. Petani Indonesia dan Krisis Ekonomi Global, Untuk Indonesia Yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat: Kategori Ekonomi, Desember 2008.
- Steinfeld H, and J. Mäki-Hokkonen, 1998. A classification of livestock production systems, Animal Production and Health Division, FAO, Rome, Italy.
- Tawaf, R. 2015. (Bukan) Swasembada Daging Sapi. Infovet Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. <http://www.majalahinfovet.com/2015/06/bukan-swasembada-daging-sapi.html> Accessed June 08th, 2015.
- _____, 2019. Membangun Industrialisasi Peternakan, PATAKA (Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi), <https://www.pataka.or.id/2019/02/27/membangun-industrialisasi-peternakan/> , Accessed February, 27th 2019. . . ,
- Yusdja, Y. dan N. Ilham. 2006. Arah kebijakan pembangunan peternakan rakyat. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. *Analisis Kebijakan Pertanian* 4: 18-38.